

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Indonesia merupakan negara maritim kaya akan adat istiadat, tradisi, suku-suku bangsa, bahasa dan juga pulau-pulau yang berteparan, di tempati oleh seluruh individu manusia dari semua kalangan sosial dan suku-suku, terdiri dari gagasan pulau dengan luas daratan yang besar serta pulau-pulau yang menjadi batas wilayah negara. Yang tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan zona ekonomi eksklusif seluas 2.78 km<sup>2</sup>. Ada sekitar 60 juta penduduk bermukim di wilayah pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan brutto nasional.<sup>1</sup>

Secara historis, wilayah pesisir telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat mengingat berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimiliki. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat berkembang di wilayah ini hingga membentuk pola penggunaan campuran yang tidak selamanya sesuai antara satu dengan lainnya. Di sisi lain, wilayah pesisir merupakan sistem ekologis dengan kemampuan produksi hasil kelautan yang sangat tinggi. Namun demikian, ekosistem ini cenderung mendapatkan tekanan, baik oleh proses alamiah maupun akibat kegiatan eksploitasi yang cenderung "berlebihan".

---

<sup>1</sup> La Ho Ho Wandoko, 2012. Agrob isnis Perikanan Tangkap kemiskinan nelayan “faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan nelayan, <http://nokhen.blogspot.com/2012/01/penyebab-kemiskinan-dikalangan-nelayan.html>, 5/92/2013

Dalam kacamata Kusnandi, kemiskinan dan rendahnya derajat kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar kategori nelayan tradisional, dimana nelayan merupakan kelompok yang menempati lapisan sosial paling miskin dibanding kelompok sosial lainnya.<sup>2</sup> Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen **yang terkontrol** sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan. Nelayan bergelut pada laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan **tidak bisa dikontrol**. Terkadang hasil tangkapan ikan dapat memenuhi suatu kebutuhan tetapi terkadang pula sebaliknya.

Kemiskinan nelayan yang berjalan dalam dimensi ruang dan waktu yang luas dan lama dengan jumlah kemiskinan yang berada di Desa Molotabu sebesar 171 kk dan 15 KK diantaranya keluarga nelayan, dari jumlah penduduk berkisar 1.183 jiwa yang terbagi dari empat dusun, yakni dusun tanjung karang 299 jiwa 25 kk miskin, Molotabu barat 416 jiwa 48 kk miskin, Molotabu Tengah 367 jiwa 46 kk miskin, Dusun Waolo 101 jiwa 52 kk miskin, dan telah mewarnai pengalaman kesejarahan berjuta penduduk di Indonesia terutama penduduk miskin nelayan yang berada di Desa ini, yang ternyata menyebabkan kemiskinan diterima

---

<sup>2</sup>Windi listianingsih, Sistem Pemasaran Hasil Perikanan Dan Kemiskinan Nelayan, 2008, <http://C08wli.pdf> – [sistem pemasaran hasil perikanan dan kemiskinan nelayan] – sumatrapdf. 5/02/2013, hal 15

sebagai bagian yang sah dari kehidupan dan mewarnai sistem nilai dan struktur sosial masyarakat pesisir pantai (nelayan).

Kemiskinan diterima sebagai keniscayaan yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Setiap usaha mengentas kemiskinan menjadi pekerjaan yang tidak mudah dan bahkan dipandang aneh dan mungkin dianggap "asosial". Dalam situasi budaya seperti ini maka gejala kemiskinan tidak cukup kalau hanya dievaluasi sebagai fungsi dari keterbatasan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan saja, tetapi juga harus diperhatikan adanya fakta bahwa mereka juga "miskin" terhadap makna kemiskinan itu sendiri. "pantang, kepercayaan, kebiasaan", dan lainnya seringkali juga berpengaruh terhadap berbagai upaya pembangunan masyarakat nelayan. Ketidakadanya motivasi masyarakat nelayan miskin untuk merubah keadaan (pasrah), menyebabkan nelayan miskin ini sulit keluar dari masalah kemiskinan.

Kemiskinan yang berlangsung mewarnai nelayan didesa ini, yang keseluruhan adalah nelayan perorangan. Berbagai kebijakan pemerintah untuk membantu nelayan pesisir di desa molotabu, yaitu merealisasikan program-program melalui PNPM (Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan) berupa SPKP (Simpan Pinjam Keluarga Perempuan), Beasiswa, Dan Sarana Prasarana, kemudian Program DKP (Diknas Kelautan dan Perikanan) berupa PUMP Budidaya dan PUMP PT (Perikanan Tangkap), PNPM dan DKP merupakan program yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan ekonomi usaha masyarakat desa terutama untuk nelayan yang telah menerima bantuan secara khusus dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). Program-

program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dikalangan nelayan sudah mulai dirasakan,

Dari segi penghasilan tangkapan ikan, nelayan Molotabu memiliki korelasi kerja bersama bakul (Pendola) system kerja ini mengakibatkan pendapatan nelayan cenderung rendah dari yang seharusnya diperoleh, ketidakseimbangan harga beli pedagang perantara (bakul) memberi dampak negatif terhadap nelayan. Hal yang sangat disayangkan ketika melaut nelayan sering berselisih dengan persoalan angin, ombak, arus, hujan dan dinginnya suasana laut tetapi ketika kembalinya dipesisir harga yang diterima belum sebanding dengan semestinya.

Hal ini benar-benar disayangkan, karena potensi ikan yang memiliki nilai jual yang tinggi, di samping itu pertambahan penduduk Indonesia yang semakin tinggi memberikan dampak positif terhadap nilai konsumsi, yang memberikan peluang bagi nelayan untuk terus melanjutkan profesinya, dan cukup bagi keluarga nelayan untuk memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi patut disayangkan keluarga nelayan masih merasakan ketidaknyamanannya sebuah kekurangan.

Berbagai polemik yang menjadi dilema nelayan ketika melaut salah satu yaitu musim (iklim), musim merupakan suatu pengaruh besar terhadap pencarian fishing ground nelayan untuk memperoleh penghasilan. iklim yang buruk mengakibatkan keluarga nelayan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara keseluruhan, kendala ini tidak hanya memberikan dampak terhadap nelayan dan keluarga nelayan, disamping itu juga dirasakan oleh masyarakat

lainya yang mengkonsumsi ikan seperti diperkotaan. Keadaan musim (iklim) yang buruk berdampak terhadap harga jual ikan kepada konsumen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Desa Molotabu?
- 1.2.2 Fako-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Kemiskinan Nelayan Di Desa Molotabu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji polemik yang ada berdasarkan persoalan di rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Desa Molotabu.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apakah Yang Menyebabkan Kemiskinan Nelayan Di Desa Molotabu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat berguna terutama ditujukan untuk:

- 1.4.1 Bagi penulis memberikan suatu pemahan baru tentang realita kehidupan masyarakat dalam menghadapi tingginya kebutuhan pokok yang semakin meningkat.
- 1.4.2 Bagi pembaca memberikan suatu modal untuk mengikuti atau menyempurnakan penelitian ini, atau sebagai bahan bacaan untuk menambahkan suatu ilmu pengetahuan.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Pertama, berjudul *Kajian Sosiologi Kemiskinan nelayan Di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango*, dengan ini saya melihat dan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan permasalahan-permasalahan yang hampir sama dengan judul-judul penelitian sebagai berikut:

*Imilda Khotim, Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*, dengan hasil penelitian sebagai berikut Pertama, Sistem bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan, tidak memenuhi asas-asas Syariat Islam, masyarakat nelayan Kalibuntu menganggap, sebagai tradisi sehingga tidak dianggap sebagai persoalan dan merasa tidak perlu dipersoalkan. Kedua: Sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan cenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak pada kelompok borjuis atau para pemodal dan kurang menguntungkan pada kelompok proletar atau nelayan buruh. Ketiga: Sistem pembagian hasil tidak memenuhi rasa keadilan, baik pemilik modal maupun pemilik perahu cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tarap ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum islam dan hukum positif) yang rendah

sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.<sup>3</sup>

Kedua, penelitian *Windi listianingsih, Sistem Pemasaran Hasil Perikanan Dan Kemiskinan Nelayan (Studi Kasus: Di Ppi Muara Angke, Kota Jakarta Utara)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sistem pemasaran perikanan di Muara Angke cenderung bersifat terikat baik antara nelayan dengan bakul, nelayan dengan pedagang pengumpul, maupun bakul dengan pedagang pengumpul. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan meliputi: bakul kecil, pedagang pengumpul/bakul besar, TPI, pedagang pengecer, dan eksportir. Berdasarkan analisis kemiskinan menggunakan indikator WB dan BPS diketahui bahwa mayoritas nelayan andun tradisional Muara Angke berada dalam kategori miskin karena memiliki pendapatan di bawah nilai indikator WB dan BPS. Berdasarkan perbandingan pendapatan dengan UMR diketahui bahwa mayoritas nelayan andun tradisional Muara Angke dianggap tidak layak hidup di Jakarta dengan pendapatan yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena rendahnya penghasilan yang diperoleh nelayan. Rendahnya penghasilan yang diperoleh nelayan terjadi akibat adanya gejala eksploitasi dalam praktik pemasaran dan penerapan sistem bagi hasil. Gejala eksploitasi dalam praktik pemasaran dilakukan pedagang perantara, yaitu bakul/pengumpul sedangkan gejala eksploitasi dalam bagi hasil dilakukan oleh juragan terhadap ABK. Gejala eksploitasi inilah yang menyumbangkan kemiskinan kepada nelayan. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan

---

<sup>3</sup> Imilda Khotim, *Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*, 2007. <http://022109-imelda-khotim.pdf> - [Masyarakat nelayan] – SumateraPDF. 05/02/2013

memberikan bantuan berupa program PEMP dan memberikan berbagai pelayanan pada masyarakat melalui Koperasi Perikanan Mina Jaya (KPMJ) DKI Jakarta.<sup>4</sup>

Dari kedua penelitian diatas telah menggambarkan ketergantungan antara pemilik, buruh, dan tengkulak, yang cenderung lebih merugikan buruh nelayan dan menguntungkan pemilik dan tengkulak dari pembagian hasil dan sistem penjual. Hingga kemiskinan yang melanda buruh nelayan tidak akan berkurang ketika sistem matarantai ini masih berlangsung.

Jika dibandingkan dengan kondisi sosial yang ada di desa Molotabu, kondisi ini hampir sama adanya tetapi yang membedakan yaitu tidak adanya pemilik modal dan kapal besar (pamo) sehingga eksploitasi tenaga kerja bagi hasil tidak terjadi, yang ada hanya kapal kecil milik perorangan, jadi sistem keuntungan yang dominan kepada pemilik modal tidak terjadi, tetapi sistem eksploitasi tengkulak atau bakul berlangsung disana dengan harga beli yang rendah dengan penjualan kembali kepada pembeli dengan harga yang tinggi.

---

<sup>4</sup> Windi listianingsih, op. cit, hal. Abstrak, 5/02/2013